

ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI TIONGKOK DALAM MERESPONS KEBERADAAN THAAD DI KOREA SELATAN

Teresa Antania¹⁾, Idin Fasisaka²⁾, Penny Kurnia Putri³⁾
^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: teresa.tania21@gmail.com¹, idinfasisaka@gmail.com²,
penny.tjokrodihardjo@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to explain the change in China's response regarding the deployment of THAAD in South Korea. THAAD is one of United States – South Korea cooperation in order to deter North Korea, but China also views the THAAD as a threat to its national security. China retaliated with a boycott towards South Korea in 2016, but then decided to normalize its relations with South Korea at the end of 2017 even though THAAD is still deployed in South Korea. The theoretical framework in this research used liberalism's economic interdependence theory to analyze this case, with further explanation using trade-peace model. This research found that the reason behind China's change of response regarding THAAD was based on a tendency to maintain its economic relations with South Korea.

Keywords: *China-South Korea relations, THAAD boycott, economic interdependence, trade-peace model*

1. PENDAHULUAN

Hubungan bilateral antara Tiongkok dan Korea Selatan sempat memburuk pada pertengahan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 akibat adanya rencana pemasangan anti-misil yang bernama THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*). Anti-misil THAAD merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat selaku sekutu Korea Selatan. Bantuan ini diberikan dalam rangka menghadapi ancaman terhadap keamanan wilayah Korea Selatan karena adanya kegiatan uji coba nuklir yang terus-menerus dilakukan oleh Korea Utara sejak tahun 2013 (CNN, 9 Maret 2019). Instalasi THAAD oleh Amerika Serikat tersebut dapat berfungsi untuk menangkali kemungkinan serangan misil dengan cara

menembak misil yang telah diluncurkan (Panda, 2016).

Pemasangan THAAD dimaksudkan untuk memperkuat deterensi Korea Selatan terhadap Korea Utara. Namun pada saat yang sama, isu mengenai instalasi THAAD di Korea Selatan memperparah ketegangan di Semenanjung Korea. Instalasi THAAD di Korea Selatan dianggap sebagai ancaman keamanan negara oleh Tiongkok sehingga mendapatkan protes keras. Sejak awal isu instalasi THAAD terdengar, Tiongkok telah menunjukkan keberatan melalui pernyataan beberapa pejabat pemerintahannya. Tiongkok khawatir bahwa sewaktu-waktu sistem radar yang terdapat pada THAAD tersebut dapat digunakan Amerika Serikat untuk memata-matai Tiongkok, dikarenakan

letaknya yang sangat dekat dan strategis dengan Tiongkok (Volodzko, 2017).

Kekhawatiran Tiongkok bahwa THAAD akan mengancam keamanan negaranya tidak ditanggapi oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut tetap meneruskan kerja sama mereka dengan dikirimnya komponen pertama THAAD ke Korea Selatan pada Maret 2017 (Chappell, 2017). Perkembangan ini membuat Tiongkok semakin lantang mengungkapkan ketidaksetujuannya. Tiongkok kemudian melakukan boikot ekonomi ke Korea Selatan sebagai bentuk protes lebih lanjut. Namun kurang lebih satu tahun sejak dilaksanakannya boikot terhadap Korea Selatan, Tiongkok memutuskan untuk mengakhiri tindakan boikot tersebut setelah petinggi-petinggi negara dari Tiongkok dan Korea Selatan melakukan pertemuan. Keputusan ini diumumkan melalui hasil pertemuan Presiden Tiongkok, Xi Jinping dan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-In, dengan menyatakan bahwa baik Korea Selatan maupun Tiongkok sama-sama menyatakan bahwa petinggi kedua negara telah berbicara dan saling mencapai pemahaman mengenai kepentingan yang dimiliki masing-masing negara (Choe, 2017; Volodzko, 2017).

Saat Tiongkok memutuskan untuk mengakhiri tindakan boikotnya, THAAD kiriman Amerika Serikat masih tertanam di tanah Korea Selatan. Artinya, Tiongkok mengubah kebijakannya walau masih ada THAAD yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara Tiongkok.

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian menjadi tertarik untuk meneliti mengenai alasan Tiongkok mengubah kebijakan luar negerinya dalam merespons keberadaan THAAD di Korea Selatan.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merujuk kepada dua tulisan ilmiah sebagai kajian pustaka yang menjadi acuan bagi Penulis. Kajian pustaka pertama yaitu "*Trade, Investment and Economic Interdependence between South Korea and China*" oleh Joon-kyung Kim, Yangseon Kim, dan Chung H. Lee (2006), memaparkan tentang hubungan ekonomi antara Korea Selatan dan Tiongkok, khususnya mengenai efek dari perubahan struktur ekspor Tiongkok serta penanaman modal asing oleh Korea Selatan di Tiongkok terhadap hubungan dagangnya dengan Korea Selatan dan interdependensi yang terbentuk sebagai implikasinya. Makalah ini membantu peneliti memahami lebih jauh mengenai hubungan ekonomi yang terjadi antara Tiongkok dan Korea Selatan.

Kajian pustaka kedua, yaitu "*Economic Interdependence and Peace: A Game-Theoretic Analysis*" oleh Brett V. Benson dan Emerson M. S. Niou (2007), membahas mengenai pengambilan keputusan oleh negara untuk bekerja sama (secara ekonomi) atau berkonflik dengan suatu negara lain, dengan berdasarkan persepsi mengenai tindakan yang akan diambil negara mitra tersebut. Jurnal ini

merupakan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara interdependensi ekonomi dan konflik, dengan mengangkat studi kasus hubungan ekonomi-politik antara Tiongkok dan Taiwan (diasumsikan bahwa Taiwan merupakan negara tersendiri). Benson dan Niou dalam jurnal ini mengembangkan model untuk melihat keterkaitan perdagangan sebagai faktor yang mendukung perdamaian antar negara.

Tulisan kedua ini membantu penulis dalam memahami keterkaitan antara interdependensi ekonomi dengan konflik-perdamaian. Model yang diajukan oleh Benson dan Niou menjadi dasar bagi penulis untuk melihat kemungkinan pilihan yang diambil oleh suatu negara sebagai respons berdasarkan persepsi negara tersebut terhadap negara lain. Kemiripan situasi ketegangan politik dan interdependensi ekonomi antara Taiwan-Tiongkok dengan Korea Selatan-Tiongkok membuat kajian pustaka ini tepat digunakan sebagai rujukan.

2.2. Kerangka Teoritis

2.2.1. Teori Interdependensi Ekonomi

Teori Interdependensi Ekonomi merupakan sebuah teori yang menjelaskan keterkaitan antara konflik-perdamaian dengan hubungan interdependensi ekonomi yang dimiliki negara-negara. Negara dikatakan memiliki interdependensi secara ekonomi dengan satu sama lain saat negara-negara dapat mengalami kerugian besar jika hubungan perdagangan sampai rusak (Cooper, 1968; Waltz, 1970:205-23; Keohane & Nye, 1977; dalam

Blanchard & Ripsman, 1996:226). Kondisi saling ketergantungan ini dapat terjadi jika intensitas perdagangan di antara negara-negara sangat tinggi dan strategis.

Tulisan ini menggunakan teori interdependensi ekonomi dari perspektif liberal. Seperti yang diidentifikasi oleh Benson dan Niou (2007), pandangan liberal memandang bahwa hubungan interdependensi akan memunculkan *opportunity cost* yang menjadikan perang merupakan pilihan yang lebih merugikan negara. Interdependensi muncul dari tindakan kedua negara yang sama-sama berusaha memaksimalkan keuntungan dari perdagangan. Terciptanya hubungan interdependensi menyebabkan kerugian lebih tinggi harus dihadapi negara jika memutuskan untuk berperang, karena perang akan merusak hubungan perdagangan yang sudah intens (Copeland, 2015). Karena itu, negara akan lebih cenderung untuk menghindari konflik dengan negara yang memiliki hubungan dagang berintensitas tinggi dengannya agar tidak mendapatkan kerugian besar karena rusaknya hubungan dagang.

Teori ini membantu penulis untuk menjelaskan alasan Tiongkok melakukan normalisasi hubungan dengan Korea Selatan meskipun THAAD masih terinstalasi di Korea Selatan. Penulis akan melihat pada nilai perdagangan di antara kedua negara serta aspek-aspek hubungan perekonomian lainnya untuk mengetahui intensitas hubungan perekonomian yang dimiliki oleh Tiongkok dan Korea Selatan.

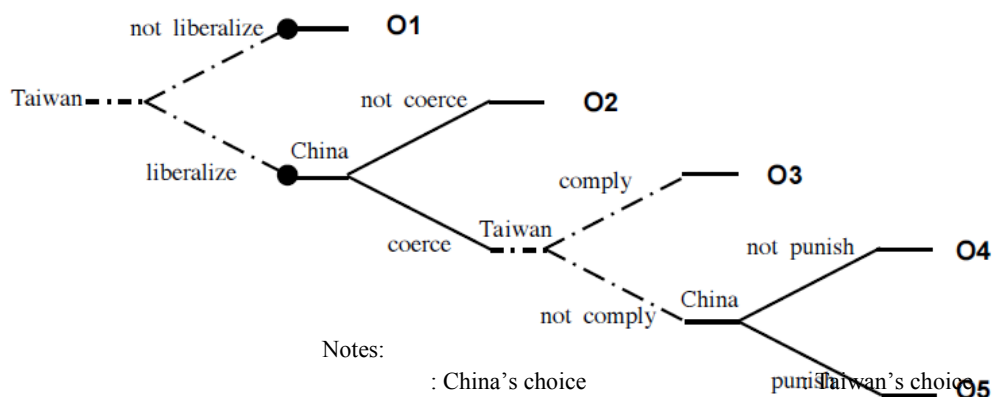
1.8.2. Trade-Peace Model

Brett V. Benson dan Emerson M. S. Niou melanjutkan penelitian menyangkut keterkaitan interdependensi ekonomi dan perdamaian dengan membuat sebuah model yang dapat lebih menjelaskan mengenai

keterkaitan antara interdependensi dan perdamaian-konflik antarnegara. Model milik Benson dan Niou (2007) didasarkan pada model dalam

first) jika keuntungan dari hubungan interdependensi digabung dengan biaya perang dapat melebihi keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh dari melakukan perang. Kedua, hubungan interdependensi antarnegara dapat menjadi

Bagan 1.1 Rangkaian Pergerakan Taiwan dan Tiongkok dalam Trade-Peace Model



Sumber: *Economic Interdependence and Peace: A Game-Theoretic Analysis* oleh B.V. Benson dan E.M.S. Niou, 2007, *Journal of East Asian Studies* 7 (hlm. 35-39)

penelitian Gartzke, Li, dan Boehmer (2001) dengan dasar argumen berikut ini. Pertama, hal yang memengaruhi keputusan negara dalam memilih antara berkonflik atau berdagang adalah kalkulasi dari penilaian relatif terhadap keuntungan interdependensi dibandingkan dengan keuntungan berperang setelah dikurangi oleh biaya perang. Jika keuntungan yang diperkirakan akan didapat dari perang atau konflik melebihi keuntungan dari hubungan interdependensi dan biaya perang, maka negara akan mengirim sinyal yang mengonfirmasi bahwa negara tersebut akan lebih memilih perang dibandingkan menjaga hubungan interdependensi. Pada situasi ini, negara dapat dikatakan sebagai negara yang mementingkan sisi politiknya (*politics-first*). Sebaliknya, negara dikatakan mementingkan sisi ekonomi (*economics-*

alat negara untuk memberikan sinyal (berupa tawaran kerja sama ataupun ancaman) kepada negara lain mengenai apa yang diinginkan tanpa menggunakan kekerasan. Fungsi interdependensi ekonomi sebagai sinyal terhadap negara lain inilah yang dapat digunakan negara untuk mencegah eskalasi konflik menuju konflik bersenjata (Benson & Niou, 2007).

Benson & Niou mencatat bahwa negara umumnya tidak memiliki informasi mengenai negara lawan secara utuh. Maka, disusunlah sebuah model untuk menjabarkan situasi yang mana kedua negara sama-sama tidak mengetahui mengenai tipe negara satu sama lain dan memiliki persepsi masing-masing mengenai tipe negara lawan. *Trade-peace model* yang dibuat oleh Benson dan Niou (2007)

terdiri dari serangkaian tindakan saling membalas antara dua negara yang memiliki hubungan interdependensi ekonomi, mencakup negara yang lebih dependen (selanjutnya disebut sebagai “Taiwan”) maupun negara yang kurang dependen (selanjutnya disebut sebagai “Tiongkok”) dalam hubungan tersebut.¹ Tindakan-tindakan yang dianalisis berkaitan dengan keputusan untuk berhubungan baik secara ekonomi atau keputusan melakukan tindakan yang dapat merusak hubungan perekonomian tetapi memberikan keuntungan politik. Tindakan-tindakan tersebut kemudian disusun membentuk rangkaian yang akan mengarah ke hasil tertentu tergantung pada keputusan yang diambil negara, seperti dapat dilihat pada Bagan 1.1.

Model yang dibuat oleh Benson dan Niou tersebut mencakup rangkaian dari keputusan-keputusan yang dapat diambil oleh suatu negara dalam suatu situasi hubungan interdependensi ekonomi dengan negara lain. Keputusan yang diambil oleh suatu negara ketika dihadapkan pada pilihan akan tergantung pada tipe negara tersebut. Jika dikaitkan dengan hasil yang diinginkan negara (sesuai dengan pilihan yang ditampilkan pada Bagan 1.1), maka negara yang mementingkan perekonomian (*economics-first*) akan berusaha mencapai hasil yang mengarah kepada tetap terjaganya hubungan perekonomian dengan negara

lawan, meskipun tujuan politiknya harus dikorbankan. Sebaliknya, negara yang mementingkan politik (*politics-first*) akan berusaha mencapai hasil-hasil yang memenuhi tujuan politiknya meskipun harus mengorbankan hubungan perekonomian dengan negara lawan. Terlepas dari tipenya, negara akan berusaha mencapai hasil yang paling menguntungkan, yaitu keadaan yang mana baik hubungan perekonomian maupun tujuan politik tercapai.

Penulis akan menggunakan *trade-peace model* oleh Benson dan Niou ini untuk membedah lebih lanjut kasus perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok dalam merespons keberadaan THAAD di Korea Selatan. Jika disesuaikan dengan kasus Tiongkok – Korea Selatan tersebut, maka Korea Selatan sebagai negara yang lebih dependen ditempatkan pada posisi Taiwan, sedangkan Tiongkok mengambil posisi negara yang lebih tidak dependen. Penggunaan *trade-peace model* untuk menganalisis respons Tiongkok terhadap THAAD Korea Selatan dirasa tepat mengingat adanya keterkaitan erat antara hubungan perekonomian dan ketegangan politik yang berpotensi menjadi sebuah konflik dalam kasus ini.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif eksplanatif.

¹ Penggunaan nama “Taiwan” dan “Tiongkok” hanya menjadi perandaian untuk menyebutkan dua negara yang berada dalam suatu hubungan interdependensi ekonomi, seperti yang digunakan dalam penjelasan *Trade-Peace Model* oleh Benson dan Niou.

3.2. Sumber Data

Jenis data yang diperoleh berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya (Hasan, 2002:58). Data bersumber dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi dari lembaga pemerintah ataupun institusi formal, artikel ilmiah, serta artikel berita, baik fisik maupun daring.

3.3. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara, khususnya Republik Rakyat Tiongkok, dengan berfokus pada hubungannya dengan Korea Selatan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang telah teruji validitasnya, berhubungan satu sama lain, dan relevan dengan kajian tulisan serta mendukung uraian/analisis pembahasan.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah *thematic analysis*., yaitu teknik analisis yang mengamati dan mencari pola dalam kasus berdasarkan konteks tertentu (Suyitno, 2018). Penulis menggunakan teknik *thematic analysis* untuk dapat menjelaskan secara lebih fokus mengenai hubungan interdependensi ekonomi dengan perubahan kebijakan yang dilakukan Tiongkok terkait THAAD.

3.6. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penelitian ini berupa teks naratif yang merupakan hasil penyusunan data secara kronologis dari sumber-sumber studi pustaka yang digunakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Masalah

4.1.1. Ketegangan Politik di Kawasan Asia Timur

Sejak tahun 2016, terjadi situasi krisis keamanan di kawasan Asia Timur karena meningkatnya aktivitas pengembangan senjata pemusnah massal berupa misil nuklir oleh Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong-un. Upaya pengembangan nuklir oleh Korea Utara menyebabkan munculnya rasa tidak aman di antara negara-negara kawasan Asia Timur, khususnya Korea Selatan. Bersama aktivitas pengembangan nuklirnya, Korea Utara juga memberi ancaman kepada Korea Selatan dan sekutunya, baik melalui surat tertulis maupun pernyataan resmi dari pejabat Korea Utara (KCNA Watch, 2017; Ward, 2017).

Ancaman dari Korea Utara menyebabkan Amerika Serikat selaku sekutu memberikan bantuan keamanan. Salah satunya berupa instalasi THAAD, yaitu sebuah sistem anti-misil balistik yang dapat menangkal misil dengan radius sampai 200 kilometer (Klingner, 2015). Rencana memberikan bantuan ini pertama diketahui publik pada tahun 2014, dan

diumumkan secara resmi pada tahun 2016. (Lee S. S., 2014; United States Forces Korea, 2016). Pengiriman pertama komponen THAAD dilakukan pada Maret 2017, sedangkan tahap pengiriman kedua dilakukan pada April 2017 (U.S. Pacific Command Public Affairs, 2017; Korea Joongang Daily, 27 April 2017).

Bantuan THAAD ini mengundang protes dari beberapa negara tetangga Korea Selatan, salah satunya adalah Tiongkok. Sejak awal terdengar isu bahwa AS akan memberikan THAAD ke Korea Selatan, Tiongkok sudah menunjukkan keberatannya. Hal ini diungkapkan melalui pejabat-pejabat pemerintahannya secara berulang kali, misalnya Presiden Xi Jinping, Menteri Pertahanan Chan Wanquan, dan Menteri Luar Negeri Wang Yi (Yonhap News Agency, 26 Agustus 2014; Chang & Ser, 2015; Agence France-Presse, 2015; Swaine, 2017). Kekhawatiran tersebut mencakup: (1) radar X-band yang dikhawatirkan akan digunakan untuk mendeteksi misil Tiongkok, (2) THAAD sebenarnya ditargetkan untuk Tiongkok karena jangkauannya tidak tepat untuk menangkal misil Korea Utara, (3) terpicunya perlombaan senjata di kawasan Asia Timur, dan (4) THAAD dimaksudkan untuk membatasi *power* Tiongkok.

4.1.2. Respons Tiongkok terhadap THAAD di Korea Selatan

4.1.2.1. Boikot Tiongkok

Tiongkok berulang kali menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana instalasi THAAD, tetapi tetap tidak ada

inisiatif dari Korea Selatan untuk menghentikan rencana tersebut. Karena itu, Tiongkok pun menegaskan kembali ketidaksetujuannya terkait isu THAAD melalui boikot yang ditujukan kepada Korea Selatan. Meick dan Salidjanova (2017) mengelompokkan boikot yang dilakukan Tiongkok terhadap Korea Selatan ke dalam tiga sektor perekonomian, yaitu sektor *entertainment*, sektor barang-barang *retail*, serta sektor pariwisata.

Tiongkok melancarkan boikot pada sektor *entertainment* dengan melarang beredarnya semua acara, program, atau konten yang berkaitan dengan *Korean Wave (hallyu)* di Tiongkok. Sebelumnya, Tiongkok merupakan pasar kedua terbesar Korea Selatan untuk memasarkan drama, musik, dan konten media *hallyu* lainnya (Meick & Salidjanova, 2017). Boikot tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian lebih dari 160 milyar won bagi perusahaan-perusahaan *entertainment* Korea Selatan.

Pada sektor barang *retail*, Tiongkok memboikot berbagai barang-barang industri unggulan Korea Selatan, seperti mobil dan peralatan elektronik, maupun barang-barang eceran yang biasa digunakan sehari-hari, misalnya kosmetik dan produk makanan. Boikot dilakukan oleh pemerintah dengan cara tidak meloloskan barang-barang tertentu (Meick & Salidjanova, 2017). Selain itu, boikot juga dilakukan oleh masyarakat Tiongkok dengan menolak membeli produk-produk Korea Selatan, atau bahkan merusak toko-toko yang menjual produk-produk tersebut.

Boikot pada sektor pariwisata dilakukan dengan cara melarang penjualan tur ke Korea Selatan pada Maret 2017 (Meick & Salidjanova, 2017). Tiongkok merupakan peringkat pertama pemasok turis mancanegara ke Korea Selatan. Akibat larangan tersebut jumlah turis Tiongkok yang pergi ke Korea Selatan mengalami penurunan sebanyak 60% dalam kurun waktu 8 bulan (Yonhap News Agency, 3 Desember 2017). Bank Korea mengumumkan pada awal bulan Desember 2017 bahwa Korea Selatan mengalami kerugian kurang-lebih lima triliun won pada tahun 2017 akibat penurunan jumlah turis tersebut.

4.1.2.2. Normalisasi Hubungan Antara Tiongkok dan Korea Selatan

Setelah mengalami periode ketegangan hubungan selama kurang lebih dua tahun, pada akhirnya baik Tiongkok maupun Korea Selatan menyatakan bahwa kedua belah pihak akan melakukan upaya normalisasi hubungan antara kedua negara. Pada Oktober 2017, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha, mengeluarkan pernyataan terkait isu THAAD dalam rapat dengan parlemen Korea Selatan yang mencakup poin klarifikasi: (1) Korea Selatan tidak sedang mempertimbangkan instalasi tambahan perangkat THAAD, (2) Korea Selatan tidak bermaksud untuk bergabung dengan jaringan global pertahanan misil Amerika Serikat, dan (3) Korea Selatan tidak bermaksud untuk melanjutkan kerja sama militer trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang menjadi pakta militer atau aliansi

militer resmi (McGuire, 2018; Jung, 2017). Tak lama setelah Menteri Luar Negeri Korea Selatan mengeluarkan pernyataan seperti tersebut di atas, pemerintah Tiongkok juga mengeluarkan pernyataan serupa melalui laman *web* resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang mencakup ketiga poin pernyataan Kang Kyung-wha serta pernyataan bahwa Tiongkok ingin “memperkuat pertukaran dan kerja sama antara kedua negara merupakan kepentingan bersama yang dimiliki kedua pihak” dan Korea Selatan – Tiongkok telah “setuju untuk mempromosikan pertukaran dan kerja sama dalam berbagai bidang agar kembali ke jalur pengembangan normal sesegera mungkin” (Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 2017).

Kemudian pada bulan Desember 2017, upaya perbaikan hubungan kembali dilanjutkan ketika presiden Tiongkok dan Korea Selatan melakukan pertemuan bilateral untuk membahas beberapa hal menyangkut “isu regional dan internasional yang menjadi kekhawatiran bersama” (The Strait Times, 2017), termasuk juga untuk membahas hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Tiongkok yang sempat menurun akibat isu THAAD. Pertemuan ini merupakan kunjungan resmi pertama Moon Jae-in ke Tiongkok dalam masa pemerintahannya. Lewat pertemuan itu, Tiongkok dan Korea Selatan berhasil mengeluarkan kesepakatan terkait isu Semenanjung Korea. Pertemuan antara Xi Jinping dan Moon Jae-in tersebut menjadi penanda melunaknya tindakan keras yang

diambil Tiongkok dalam merespons keberadaan THAAD yang digunakan Korea Selatan sebagai salah satu sistem pertahanan nasionalnya.

4.2. Analisis Perubahan Kebijakan Tiongkok dalam Merespons THAAD

Liberalisme memandang bahwa adanya interdependensi ekonomi antarnegara akan menciptakan hubungan yang damai di antara negara-negara tersebut, sebab negara akan dirugikan jika memutuskan hubungan ekonomi dalam intensitas tinggi tersebut. Berikut ini penulis akan mengulas mengenai relevansi hubungan interdependensi ekonomi yang dimiliki antara negara-negara terhadap keputusan negara untuk berkonflik atau berdamai, khususnya menyangkut kasus perubahan kebijakan Tiongkok dalam merespons THAAD di Korea Selatan ini.

Isu instalasi THAAD di Korea Selatan menempatkan hubungan Tiongkok dan Korea Selatan dalam suatu situasi yang mana tingkat interdependensi ekonomi berada pada intensitas tinggi tetapi kedua negara mengalami ketegangan politik terhadap satu sama lain. THAAD yang dimiliki Korea Selatan menjadi ancaman keamanan yang cukup penting sampai Tiongkok melakukan boikot terhadap Korea Selatan dalam berbagai bidang. Di sisi lain, periode saat isu THAAD tersebut terjadi merupakan periode ketika hubungan Tiongkok dan Korea Selatan sedang

berada pada situasi yang saling menguntungkan.

Sebelum terjadi permasalahan menyangkut kerja sama instalasi THAAD antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, Tiongkok dan Korea Selatan memiliki hubungan perekonomian yang cukup erat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya intensitas pertukaran ekspor-impor, dengan total nilai perdagangan sebesar 227 milyar dolar AS pada tahun 2015 (Korea Customs Service, 2019). Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Korea Selatan, sementara Korea Selatan merupakan mitra dagang ketiga terbesar Tiongkok. Kedua negara juga telah sepakat untuk memberlakukan perjanjian perdagangan bebas (FTA) per tahun 2015. Diperkirakan FTA tersebut akan berimbas positif menaikkan PDB Tiongkok 0,4-0,6 persen dan PDB Korea Selatan 0,95-1,25 persen (Li, Tu, & Liu, 2017).

Ketika terjadi permasalahan mengenai instalasi THAAD di Korea Selatan, hubungan perekonomian antara Tiongkok dan Korea Selatan ikut terpengaruh oleh ketegangan politik. Tiongkok menggunakan hubungan interdependensi yang dimilikinya dengan Korea Selatan sebagai alat untuk mensinyalir keinginan Tiongkok. Hubungan interdependensi antara kedua negara tersebut dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk memberitahukan keberatannya mengenai THAAD kepada Korea Selatan, yang dikeluarkan dalam bentuk boikot terhadap berbagai komoditas yang memberikan keuntungan ekonomi bagi Korea Selatan.

Berubahnya sikap Tiongkok dalam merespons keberadaan THAAD yang diberikan Amerika Serikat ke Korea Selatan dapat dijelaskan melalui *trade-peace model* yang disusun oleh Benson dan Niou. Model tersebut menunjukkan secara jelas bagaimana aspek politik dan aspek ekonomi suatu negara berkaitan dengan erat, seperti yang dapat diamati pada isu seputar THAAD ini.

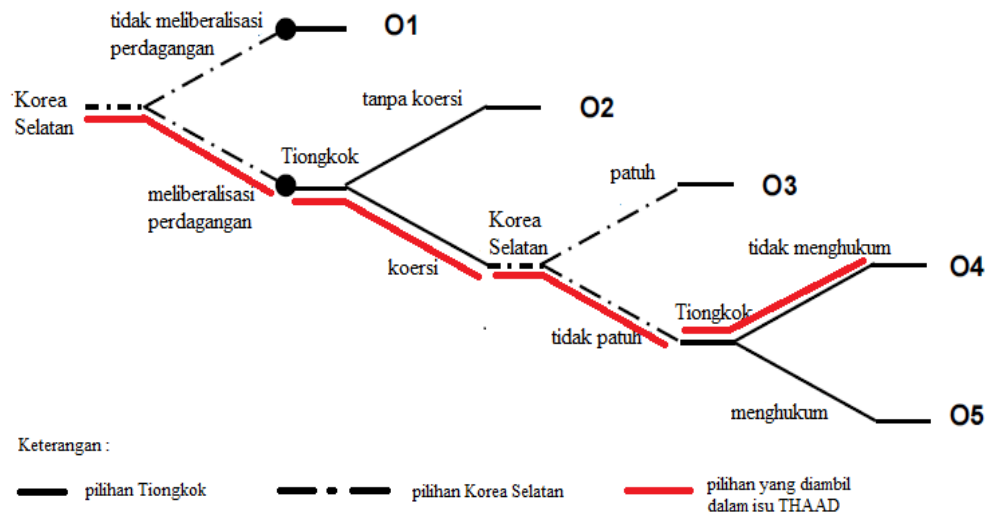
Suatu negara yang mengutamakan perekonomian (*economics-first*) dapat saja melancarkan kebijakan yang mungkin diambil jika negara tersebut mengambil sudut pandang negara yang mengutamakan politik (*politics-first*) saat menghadapi situasi yang sama. Jika Tiongkok adalah negara yang mengutamakan perekonomian alih-alih politik dalam kasus THAAD ini, pilihan tersebut akan diambil jika terjadi situasi sebagai berikut: (1) Tiongkok memperkirakan bahwa Korea Selatan adalah negara yang akan mendahulukan perekonomian (*economics-first*) dalam hubungannya dengan Tiongkok; (2) keuntungan yang diperoleh jika Korea Selatan mengikuti keinginan Tiongkok dirasa akan lebih menguntungkan daripada hanya mempertahankan keuntungan dari hubungan perekonomian saja; dan/atau (3) Tiongkok tidak akan mengalami kerugian besar jika ternyata Korea Selatan tidak mengikuti keinginan Tiongkok dan Tiongkok tidak memberikan hukuman atas keputusan tersebut.

Dalam kasus THAAD ini, ketika Tiongkok memutuskan untuk melakukan

boikot, Tiongkok mempersepsikan bahwa Korea Selatan merupakan negara yang akan mendahulukan perekonomian. Persepsi ini didasarkan pada respons Korea Selatan yang menunjukkan keraguan dalam menerima tawaran kerja sama THAAD dari Amerika Serikat ketika Tiongkok mengungkapkan keberatannya. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Korea Selatan. Oleh karena itu, Korea Selatan berhati-hati untuk tidak mengambil keputusan yang bisa membahayakan hubungan perekonomiannya dengan Tiongkok. Korea Selatan bahkan sempat menunda untuk memberi keputusan mengenai THAAD, dengan keberatan Tiongkok sebagai salah satu alasannya (Song, 2014). Sikap hati-hati Korea Selatan tersebut seolah memberikan peluang besar bahwa Korea Selatan akan mendahulukan perekonomiannya dan mengikuti keinginan Tiongkok.

Boikot yang dilakukan oleh Tiongkok juga tidak mencakup boikot terhadap barang-barang yang dibutuhkan Tiongkok dari hubungan perekonomiannya dengan Korea Selatan, misalnya barang-barang yang berkaitan dengan permesinan. Korea Selatan merupakan salah satu sumber terbesar yang menyediakan mesin industri berteknologi tinggi untuk industri manufaktur bagi Tiongkok (Wong, 2019). Komoditas yang menyokong perindustrian sangat penting bagi Tiongkok, sebab sektor industri merupakan penyumbang terbesar perekonomian Tiongkok. Dalam statistik tahunan yang dikeluarkan oleh *National Bureau of Statistics of China*, sektor industri

Bagan 4.1 Rangkaian Pilihan yang Diambil Tiongkok dan Korea Selatan Terkait Isu THAAD



menyumbang 34% untuk produk domestik bruto (PDB) Tiongkok pada tahun 2015 dan 33% pada tahun 2016 (National Bureau of Statistics of China, 2017). Angka tersebut merupakan persentase terbesar di antara keseluruhan sektor perekonomian yang menyusun PDB Tiongkok pada tahun tersebut. Dengan kata lain, jika komoditas dari Korea Selatan yang mendukung sektor industri ini diboikot oleh Tiongkok, maka Tiongkok akan terkena imbas dari boikot yang dilakukannya sendiri.

Jika Korea Selatan tunduk di bawah tekanan Tiongkok, maka Tiongkok akan mendapat keuntungan yang besar. Selain keuntungan dalam bidang perekonomian lewat perdagangan dan investasi dua arah dengan Korea Selatan, Tiongkok secara politik juga akan memperoleh keunggulan karena berhasil mempertahankan kepentingan keamanannya. Namun, ternyata respons Korea Selatan setelah terkena boikot oleh Tiongkok tidak seperti yang diperkirakan oleh Tiongkok. Korea Selatan tidak memenuhi keinginan Tiongkok untuk meniadakan THAAD di kawasan Asia Timur karena merasa bahwa keamanan wilayahnya secara militer harus didahulukan, terutama dengan adanya provokasi terus-menerus dari Korea Utara.

Pada akhirnya, Tiongkok memilih untuk tidak menghukum Korea Selatan. Tiongkok menormalisasi hubungan dengan Korea Selatan meskipun kepentingan menyangkut isu THAAD tidak terpenuhi. Jika dituangkan ke dalam *trade-peace model*, maka pilihan Tiongkok akan berujung pada hasil ke-4 (O4) seperti pada Bagan 4.1.

Keputusan Tiongkok tersebut semakin menegaskan bahwa Tiongkok merupakan tipe negara yang mengutamakan perekonomian (*economics-first*) berdasarkan *trade-peace model* yang dirancang oleh Benson dan Niou. Terputusnya atau turunnya intensitas hubungan perekonomian merupakan hal yang dihindari oleh negara bertipe *economics-first*. Awalnya, Tiongkok memang mengambil pilihan yang seolah mencerminkan negara *politics-first* dengan memutuskan untuk memboikot Korea Selatan. Namun, pada akhirnya Tiongkok lebih memilih untuk mempertahankan hubungan perekonomian melalui normalisasi hubungan dengan Korea

Selatan walaupun Korea Selatan tidak mengikuti kemauan Tiongkok untuk membatalkan kerja sama THAAD, dan tidak mengambil tindakan yang dapat semakin membahayakan hubungan perekonomian di antara kedua negara, yaitu memberikan hukuman atas ketidakpatuhan tersebut.

Keputusan Tiongkok untuk menghentikan boikot dan memulihkan hubungan perekonomian dengan Korea Selatan dimaksudkan agar hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Korea Selatan tetap terjalin, khususnya dalam bidang perekonomian. Bukan hanya Korea Selatan yang memiliki ketergantungan terhadap Tiongkok, melainkan ada interdependensi (saling ketergantungan) antara kedua negara tersebut. Setiap tahunnya Tiongkok mendapatkan keuntungan perdagangan cukup besar dari hubungan ekonominya dengan Korea Selatan. Pertumbuhan perekonomian Tiongkok juga disokong dengan adanya komoditas yang termasuk dalam sektor permesinan serta investor dari Korea Selatan. Jika Tiongkok memilih untuk meneruskan keputusan untuk memboikot atau bahkan menambah tekanan dengan memutus hubungan diplomatik, Tiongkok akan menaruh semua keuntungan yang diperoleh Tiongkok dari kerja samanya dengan Korea Selatan dalam bahaya. Artinya, kalau hubungan tersebut rusak atau terputus, Tiongkok sendiri yang akan rugi besar.

Selain kepentingan untuk mempertahankan hubungan ekonominya, adanya tiga janji yang

diutarakan Korea Selatan terkait kerja sama militernya dengan Amerika Serikat juga mempengaruhi keputusan Tiongkok. Tiga janji itu mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh Tiongkok jika meneruskan konflik. Janji tersebut juga diiringi dengan peninjauan ulang mengenai instalasi THAAD oleh kabinet baru Korea Selatan pada tahun 2017 (Wang, 2017). Ditambah dengan adanya janji dari Korea Selatan tersebut, mempertajam konflik dengan Korea Selatan menjadi pilihan yang lebih tidak menguntungkan bagi Tiongkok. Meski tidak sepenuhnya mengikuti keinginan Tiongkok yang meminta untuk meniadakan THAAD, sikap Korea Selatan yang lebih hangat kepada Tiongkok ini membuka kesempatan diplomasi baru untuk Tiongkok dalam bernegosiasi perihal isu THAAD.

5. KESIMPULAN

Isu instalasi THAAD oleh Amerika Serikat di Korea Selatan telah menempatkan hubungan Tiongkok dan Korea Selatan dalam posisi yang unik. Di satu sisi, isu tersebut membuat hubungan Korea Selatan dan Tiongkok yang telah mulai menghangat menjadi tegang kembali secara politik. Di sisi lain, ketika permasalahan THAAD tersebut berlangsung, Tiongkok dan Korea Selatan tengah berada pada kondisi yang mana hubungan perekonomian sedang sangat baik. Hubungan interdependensi ekonomi yang dimiliki kedua negara tersebut akan terlalu merugikan jika diputus, sehingga Tiongkok lebih mementingkan hubungan

perekonomian dengan Korea Selatan dan setuju untuk melakukan normalisasi hubungan yang sempat menegang walaupun sebelumnya sempat melakukan boikot sebagai tindakan protes terhadap THAAD. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa adanya interdependensi ekonomi di antara dua negara dapat mengarahkan negara untuk menghindari konflik berkelanjutan dengan negara mitranya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Benson, Brett V. & Emerson M. S. Niou. (2007). Economic Interdependence and Peace: A Game-Theoretic Analysis. *Journal of East Asian Studies*, 7, 35-59.
- Blanchard, Jean-Marc F. & Norrin M. Ripsman. (1996). Measuring economic interdependence: A geopolitical perspective. *Geopolitics and International Boundaries*, 1 (3), 225-246.
- CNN. (2019, Maret 9). *North Korea Nuclear Timeline Fast Facts*. Diakses 29 Juli 2019, dari CNN: <https://edition.cnn.com/2013/10/29/world/asia/north-korea-nuclear-timeline---fast-facts/index.html>
- Chappell, Bill. (2017, Maret 7). *U.S. Sends First Parts Of THAAD Missile Defense System To South Korea*. Diakses 22 Januari 2019, dari NPR: <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/03/07/518977830/u-s-sends-first-parts-of-thaad-missile-defense-system-to-south-korea>
- Choe, Sang-hun. (2017, Oktober 30). *South Korea and China End Dispute Over Missile Defense System*. Diakses 8 Februari 2019, dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2017/10/30/world/asia/north-korea-nuclear-test-radiation.html>
- Copeland, Dale C. (2015). *Economic Interdependence and War*. New Jersey: Princeton University Press.
- Fifield, Anna. (2016, Februari 7). *South Korea, U.S. to start talks on anti-missile system*. Diakses 13 Juni 2019, dari The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/south-korea-united-states-to-start-talks-on-thaad-anti-missile-system/2016/02/07/1eaf2df8-9dc4-45e3-8ff1-d76a25673dbe_story.html?utm_term=.3b60513db5bc
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Institute for Security & Development Policy. (2017, Oktober). *THAAD on the Korean Peninsula*. Diakses 15 Mei 2019, dari <http://isd.eu/content/uploads/2016/11/THAAD-Backgrounder-ISDP-2.pdf>
- Judson, Jen. (2016, Juli 7). *THAAD To Officially Deploy to South Korea*. Diakses 27 Juni 2019, dari Defense News: <https://www.defensenews.com/home/2016/07/08/thaad-to-officially-deploy-to-south-korea/>
- Jung, Min-kyung. (2017, Oktober 30). *Seoul not considering joining US missile defense system: FM Kang*. Diakses 5 Mei 2019, dari Korea Herald: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20171030000817>
- KCNA Watch. (2017, September 14). *KAPPC Spokesman on DPRK Stand toward UNSC "Sanctions Resolution"*. Diakses 22 Juni 2019, dari KCNA Watch: <https://kcnawatch.org/newstream/1505345461-35556086/kappc-spokesman-on-dprk-stand-toward-unsc-sanctions-resolution/>
- Kementerian Luar Negeri Tiongkok. (2017, Oktober 31). *中韩双方就中韩关系等进行沟通*. Diakses 5 Mei 2019, dari https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1506044.shtml

- Korea Customs Service. (2019). *China CN Balance Payment for Year*. Diakses 5 Mei 2019, dari Korea Customs Service: <http://www.customs.go.kr/kcshome/trade/TradeCountryView.do?layoutMenuNo=&year=2017&nation=China&nationCd=CN>
- Korea Joongang Daily. (2017, April 27). *Thaad battery installed in dead of night*. Diakses 23 Juni 2019, dari Korea Joongang Daily: <http://mengnews.joins.com/view.aspx?aId=3032721>
- Kim, Joonkyung, Yangseon Kim & Chung H. Lee. (2006). Trade, Investment and Economic Interdependence between South Korea and China. *the 12th KEA International Conference*. Seoul: Korea Development Institute.
- Klingner, B. (2015, Juni 12). South Korea Needs THAAD Missile Defense. *Backgrounder*, pp. 1-13.
- Lee, Samuel Songhoon. (2014, Juni 3). *Why wouldn't S. Korea want U.S. missile defenses?* Diakses 15 Juni 2019, dari CBS News: <https://www.cbsnews.com/news/u-s-proposes-advanced-missile-defense-system-in-south-korea/>
- Li, Si-qi, Tu Xin-quan, & Liu Bin. (2017). *Progress and Implications of the China-Korea FTA*. Diakses 3 Juli 2019, dari Korea Economic Institute of America: http://keia.org/sites/default/files/publications/koreaseconomy_ch3_progress_implications_of_the_china-korea_fta.pdf
- McGuire, Kristian. (2018, February 27). *China-South Korea Relations: A Delicate Détente*. Diakses 1 Mei 2019, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2018/02/china-south-korea-relations-a-delicate-detente/>
- Meick, Ethan & Nargiza Salidjanova. (2017, Juli 26). *China's Response to U.S.-South Korean Missile Defense System Development and its Implications*. Diakses 22 Januari 2019, dari https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Report_China%27s%20Response%20to%20THAAD%20Deployment%20and%20its%20Implications.pdf
- National Bureau of Statistics of China. (2017). *China Statistical Yearbook 2017*. Diakses 26 Juli 2019, dari National Bureau of Statistics: <http://www.stats.gov.cn/tjsj/nds/2017/index.htm>
- Panda, Ankit. (2016, February 25). *What Is THAAD, What Does It Do, and Why Is China Mad About It?* Diakses 12 Desember 2018, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2016/02/what-is-thaad-what-does-it-do-and-why-is-china-mad-about-it/>
- Song, Sang-ho. (2014, November 6). S. Korea faces tough decision on THAAD. Diakses 31 Juli 2019, dari The Korea Herald: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20141106001119>
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka
- U.S. Pacific Command Public Affairs. (2017, Maret 6). *U.S. Pacific Command Deploys THAAD to Korean Peninsula*. Diakses 5 Mei 2019, dari U.S. Indo-Pacific Command: <https://www.pacom.mil/Media/News/News-Article-View/Article/1104300/us-pacific-command-deploys-thaad-to-korean-peninsula/>
- United States Forces Korea. (2016, Juli 8). *ROK & U.S. Joint Statement: ROK-U.S. Alliance agrees to deploy THAAD*. Diakses 9 Juli 2019, dari United States Forces Korea: <https://www.usfk.mil/Media/News/Article/831175/rok-us-joint-statement-rok-us-alliance-agrees-to-deploy-thaad/>
- Volodzko, David Joseph. (2017, November 18). *China wins its war against South Korea's US THAAD missile shield – without firing a shot*. Diakses 13 Februari 2019, dari South China Morning Post: <https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2120452/china-wins-its-war-against-south-koreas-us-thaad-missile>
- Wang, Lei. (2017, Mei 10). *Expert: Moon to reconsider THAAD deployment in*

South Korea. Diakses 5 Agustus 2019, dari CGTN:
https://news.cgtn.com/news/3d517a4e78677a4d/share_p.html

Ward, Alex. (2017, September 14). *North Korea: the US should be "beaten to death like a rabid dog"*. Diakses 2 Juni 2019, dari Vox:
<https://www.vox.com/world/2017/9/14/16306772/north-korea-united-states-japan-south-korea-trump-rabid-dog-threat>

Wong, Frank Ka-Ho. (2019, Februari 18). *China's Machinery Industry: Structural Reforms Bring New Incentives, Tax Breaks*. Diakses 4 Agustus 2019, dari China Briefing: <https://www.china-briefing.com/news/chinas-machinery-industry-investor-incentives/>

Yonhap News Agency. (2017, Desember 3). *Damage from China's ban on S.Korean tours estimated at 7.5 tln won*. Diakses 12 Februari 2019, dari Yonhap News Agency:
<https://en.yna.co.kr/view/AEN20171203004100320>